# BUPATI MINAHASA SELATAN
# PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN**
**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui gratifikasi, maka dipandang perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

*6. Peraturan Pemerintah ...*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
4. Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan;
6. Gratifikasi yang Dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oelh Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima;

*7. Gratifikasi ...*

7. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima;

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah ini bertujuan:

a. Memberikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi; dan
b. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II
PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu:

a. Transparansi;
b. Akuntabilitas;
c. Kepastian Hukum;
d. Kemanfaatan;
e. Kepentingan Umum;
f. Independensi; dan
g. Perlindungan bagi Pelapor.

Pasal 4

(1) Prinsip Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercermin dari adanya mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai negeri/penyelenggara negara.
Akan tetapi, prinsip ini tidak serta merta melekat pada setiap tahapan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.
(2) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu pada pelapor gratifikasi dan KPK sebagai lembaga Negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan gratifikasi. Kepada pelapor gratifikasi, prinsip akuntabilitas diimplementasikan

*sebagai bentuk ...*

sebagai bentuk kewajiban dari Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan pada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Demikian juga dengan prinsip akuntabilitas yang juga melekat pada KPK yang menjalankan tugas untuk menerima hingga menetapkan status kepemilikan gratifikasi. KPK mempunyai kewajiban untuk menentukan status kepemilikan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh KPK dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

(3) Prinsip Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berarti sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum maka KPK dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan. Proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pihak pelapor gratifikasi, penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

(4) Prinsip Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengacu pada aspek pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara. Sedangkan gratifikasi lain yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan, kemanfaatan patut diarahkan pada kemanfaatan oleh institusi dan kemanfaatan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam kondisi tertentu gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan dapat disumbangkan pada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.

(5) Prinsip Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Prinsip ini juga menekankan pada sikap untuk mendahulukan kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan pribadi. Dalam konteks pengendalian gratifikasi, prinsip kepentingan umum terwujud dari tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Dan jika dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan maka wajib dilaporkan pada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap pegawai negeri/penyelenggara negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas sebagai abdi Negara. Demikian juga dengan KPK yang menjalankan tugasnya dengan mengacu pada kepentingan publik secara

luas, termasuk dalam penerimaan laporan gratifikasi hingga penetapan status kepemilikan gratifikasi.

(6) Prinsip Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bagi pelapor gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan tersebut akan memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

(7) Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Pelapor gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) UU KPK. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut KPK mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi. Institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan prinsip perlindungan pelapor gratifikasi ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap dari pelapor.

## BAB III
## JENIS-JENIS GRATIFIKASI

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 5

Jenis-jenis Gratifikasi terdiri atas:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

### Bagian Kedua
### Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan

#### Pasal 6

Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima.

#### Pasal 7

Jenis-jenis Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah Gratifikasi yang diterima:
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);

*e. dalam proses ...*

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; dan
j. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

Pasal 8

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang wajib dilaporkan seperti disebut di atas, terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan tersebut dalam kondisi tertentu memiliki potensi dibelanggunakan pihak lain untuk mempengaruhi Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 9

Jenis-jenis Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Gratifikasi yang diterima dari:
a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
b. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama

*Pasal 10 ...*

Pasal 10

Selain jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan dalam Pasal 9, juga terdapat gratifikasi yang terkait dengan kedinasan yang wajib dilaporkan yaitu:

a. Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar;
b. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif;
c. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan; dan
d. Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi.

Bagian Ketiga
Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

Pasal 11

Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.

Pasal 12

Jenis-jenis Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

*h. keuntungan ...*

h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
l. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Pasal 13

Selain jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dalam Pasal 11, juga terdapat gratifikasi yang terkait dengan kedinasan yang tidak wajib dilaporkan yaitu setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
a. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
b. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan; dan
c. Pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

BAB IV
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 14

Mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut:
a. Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

*Pasal 16 ...*

Pasal 16

(1) Setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus memberikan laporan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantasan korupsi sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 17

(1) Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah rusak atau busuk, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung disalurkan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan.
(2) Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
(3) Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan analisis dna pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 18

(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Minahasa Selatan.
(2) Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati Minahasa Selatan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut:

*a. penerima ...*

a. penerima laporan Gratifikasi danri Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di lingkungan kerjanya;
b. melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi;
c. sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menerima pelaporan Gratiffikasi dari Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
b. Melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;
e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
f. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terkait pemantauan penerapan prgram pengendalian Gratifikasi;
g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Bupati ini oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
h. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Bupati Minhasa Selatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB VI
## PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

### Pasal 20

(1) Unit Pengendalian Gratifikasi wajib memberikan jaminan perlindungan berupa perlindungan hukum dan jaminan keamanan serta menjaga kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi;
(2) Unit Pengendalian Gratifikasi akan mengajukan permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK bagi pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk ancaman terhadap karir pelapor.

## BAB VII
## PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Pasal 21

Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang patuh atau tidak patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi ini akan

*diberikan penghargaa ...*

diberikan penghargaan atau sanki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYEDIAAN SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

Pasal 22

Semua sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi ini termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasana pendukung akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan wajib menandatangani pakta integritas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 12 Februari 2018

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

**Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si**
**PEMBINA UTAMA MADYA**
**NIP. 19581023 198103 1 012**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR : 10 Tahun 2018
TANGGAL : 12 Februari 2018
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**FORMULIR I**

## LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Pelapor / Penerima | | | |
| Unit Kerja / Jabatan | | | |
| NIP | | | |
| No. Kontak | HP. | Telp. | Email. |

DATA PEMBERI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Pemberi | | | | | | | |
| Jabatan / Pekerjaan | | | | | | | |
| Alamat | | | | | | | |
| Hubungan Pemberi dengan SKPD / Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | | | Pengguna Layanan | | Wajib Pajak | | Penyedia Barang & Jasa / Mitra Kerja |
| | | | Lainnya | ..... | | | |
| No. Kontak | HP. | | | Telp. | | Email. | |

URAIAN PENERIMAAN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat Penerimaan | | Gedung/Lantai/ Ruangan/ Blok/RT/RW | | | | | | | |
| | | Kel/Kec/Kab/Kota | | | | | | | |
| Waktu Penerimaan | | Pukul/Hari | | | | | | | |
| | | Tanggal/Bln/Thn | | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | | Dalam Kegiatan | | Kedinasan | | Seremonial | | Lainnya | ..... |
| | | Uraian Kegiatan | | | | | | | |
| Uraian Gratifikasi yang diterima | | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | |
| | | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | | 1. | Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 2. | Surat Undangan Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 3. | ..... | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 4. | ..... | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 5. | ..... | | | | | | Ada / Tidak *) |
| Akomodasi dibiayai APBD Kabupaten Minahasa Selatan *(khusus penerimaan dalam kedinasan) | | | Ya | Jika Ya, sebutkan rekening biaya yang dibebankan: ..... | | | | | |
| | | | Tidak | | | | | | |

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Tim Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lainnya.

.....(tempat)....., tanggal/bulan/tahun pelaporan

ttd

(nama pelapor)

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR : 10 Tahun 2018
TANGGAL : 12 Februari 2018
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

FORMULIR II

## LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Pelapor / Penerima | | | |
| Unit Kerja / Jabatan | | | |
| NIP | | | |
| No. Kontak | HP. | Telp. | Email. |

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah **menolak** penerimaan Gratifikasi ini:

DATA PEMBERI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Pemberi | | | | | | | |
| Jabatan / Pekerjaan | | | | | | | |
| Alamat | | | | | | | |
| Hubungan Pemberi dengan SKPD / Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | | | Pengguna layanan | | Wajib Pajak | | Penyedia barang & jasa / Mitra Kerja |
| | | | Lainnya | ..... | | | |
| No. Kontak | HP. | | Telp. | | Email. | | |

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat Penolakan Penerimaan | | Gedung/Lantai/ Ruangan/ Blok/RT/RW | | | | | | | |
| | | Kel/Kec/Kab/Kota | | | | | | | |
| Waktu Penolakan Penerimaan | | Pukul/Hari | | | | | | | |
| | | Tanggal/Bln/Thn | | | | | | | |
| Uraian Penerimaan yang ditolak | | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | |
| | | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | | Dalam Kegiatan | | Kedinasan | | Seremonial | | Lainnya | ..... |
| | | Uraian Kegiatan | | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | | 1. | Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 2. | Surat Undanga Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 3. | Bukti Penolakan penerimaan lainnya | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 4. | ..... | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | | 5. | ..... | | | | | | Ada / Tidak *) |
| Akomodasi dibiayai APBD Kabupaten Minahasa Selatan *(khusus penerimaan dalam kedinasan) | | | Ya | Jika Ya, sebutkan rekening biaya yang dibebankan: | | | | | |
| | | | Tidak | | | | | | |

Demikian laporan penolakan penerimaan gratifikasi disampaikan.

.....(tempat)....., tanggal/bulan/tahun pelaporan

ttd

(nama pelapor)

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

FORMULIR III

## LAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Pelapor | | | |
| Unit Kerja / Jabatan | | | |
| NIP | | | |
| No. Kontak | HP. | Telp. | Email. |

DATA PENERIMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Penerima | | | | | |
| Jabatan / Pekerjaan | | | | | |
| Alamat | | | | | |
| Hubungan Penerima dengan SKPD / Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | Hubungan: | | Perorangan | | PNS |
| | Golongan Penerima: | | Korporasi | | Penyedia barang dan jasa / Mitra Kerja |
| | | | Instansi Pemerintah | | Lainnya |
| | | | ..... | | |
| No. Kontak | HP. | | Telp. | | Email. |

URAIAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat Penyerahan Pemberian Gratifikasi | Gedung/Lantai/ Ruangan/ Blok/RT/RW | | | | | | | |
| | Kel/Kec/Kab/Kota | | | | | | | |
| Waktu Pemberian Penerimaan | Pukul/Hari | | | | | | | |
| | Tanggal/Bln/Thn | | | | | | | |
| Jenis Gratifikasi yang diberikan | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | |
| | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | Dalam Kegiatan | | Kedinasan | | Seremonial | | Lainnya | ..... |
| | Uraian Kegiatan | | | | | | | |
| Pemberian dibiayai APBD Kabupaten Minahasa Selatan | | Ya | Jika Ya, sebutkan rekening biaya yang dibebankan: ..... | | | | | |
| | | Tidak | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | 1. | Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dari penerima | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 2. | Surat undangan kepada penerima gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 3. | Bukti penganggaran pemberian gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 4. | Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang sah sebagai penerima gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 5. | Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/kwitansi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 6. | ..... | | | | | | |

Demikian laporan pemberian gratifikasi disampaikan.

.....(tempat)....., tanggal/bulan/tahun pelaporan

ttd

(nama pelapor)

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

FORMULIR IV

## LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Pelapor | | | |
| Unit Kerja / Jabatan | | | |
| NIP | | | |
| No. Kontak | HP. | Telp. | Email. |

Dengan ini menyampaikan laporan **permintaan** Gratifikasi yang **bersifat pemerasan dan/atau pemaksaan** dari:

DATA PENERIMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Penerima | | | | | |
| Jabatan / Pekerjaan | | | | | |
| Alamat | | | | | |
| Hubungan Penerima dengan SKPD / Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | Hubungan: | | Perorangan | | PNS |
| | Golongan Penerima: | | Korporasi | | Penyedia barang dan jasa / Mitra Kerja |
| | | | Instansi Pemerintah | | Lainnya |
| | | | ..... | | |
| No. Kontak | HP. | | Telp. | | Email. |

URAIAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat Permintaan Gratifikasi | Gedung/Lantai/ Ruangan/ Blok/RT/RW | | | | | | | |
| | Kel/Kec/Kab/Kota | | | | | | | |
| Waktu Permintaan Gratifikasi | Pukul/Hari | | | | | | | |
| | Tanggal/Bln/Thn | | | | | | | |
| Jenis Gratifikasi yang diminta | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | |
| | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | Dalam Kegiatan | | Kedinasan | | Seremonial | | Lainnya | ..... |
| | Uraian Kegiatan | | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | 1. | Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dari penerima | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 2. | Surat undangan kepada penerima gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 3. | Bukti penganggaran pemberian gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 4. | Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang sah sebagai penerima gratifikasi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 5. | Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/kwitansi | | | | | | Ada / Tidak *) |
| | 6. | ..... | | | | | | |

Demikian laporan permintaan gratifikasi disampaikan.

.....(tempat)....., tanggal/bulan/tahun pelaporan

ttd

(nama pelapor)

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

FORMULIR V

**MEMO**

Nomor :
Kepada : Komite Pengendalian Gratifikasi
Dari : Tim Pengendalian Gratifikasi
Lampiran :
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

| No. | Tempat Penerimaan | Penerima/ Pelapor | Hubungan Pemberi | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Penerimaan | Penetapan Pemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waktu Penerimaan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) | Penanganan pelaporan Penerimaan | Tindak Lanjut Pemanfaatan |
| | | | | | | |

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/ Fasilitas

| No. | Tempat Penolakan | Pelapor/ Penolak Gratifikasi | Hubungan Pemberi | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Penerimaan yang ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| | Waktu Penolakan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) | |
| | | | | | |

3. Pemberian Gratifikasi

| No. | Tempat Pemberian | Pelapor/ Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Pemberian | Pemberian Sah/ Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waktu Pemberian | Jabatan | Golongan Penerima | Nilai (Rp) | Anggaran Pembiayaan Pemberian | |
| | | | | | | |

4. Permintaan Gratifikasi

| No. | Tempat Permintaan | Pelapor/ Pemberi Gratifikasi | Hubungan Peminta | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Permintaan | Tindak Lanjut Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waktu Permintaan | Jabatan | Golongan Peminta | Nilai (Rp) | | |
| | | | | | | |

Demikian kami sampaikan, mohon dapat diproses lebih lanjut. Terima kasih.

**TIM PENGENDALI GRATIFIKASI**

(Nama Jelas)
Ketua

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMP RAN VII : PERATURAN B PATI MINAHASA SELAT N
NOMC R :
TANG AL :
TENT NG : PENGENDALIA GRATIFIKASI DI LINGK JNGAN PEMERINTAH KA BUPATEN MINAHASA SE ATAN

FORM ILIR VII

**LEMBAR REKAPITUL ASI PENANGANAN DAN TI DAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKA**
**TIM PENGE NDALI GRATIFIKASI**
**PEMERINTAH KABU ATEN MINAHASA SELATA**

| No. | Pelapor | | Pem eri | | emberian | | | Penetapan pemilikan | | Tindak lanjut penetapan | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nama | abatan | Nama | Jabatan/ Hubungan | Bentuk | Nilai Eq Rp. | Ti ak dipr ses | Instansi | Pelapor | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**KOMITE PENGENDALI GRATIFI KASI**

(Nama Jelas)
Ketua

**TIM PENGENDALI GRATIFIKASI**

(Nama Jelas)
Ketua

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

LAMP RAN VI : PERATURAN B PATI MINAHASA SELAT N
NOMC R :
TANG AL :
TENT NG : PENGENDALIA I GRATIFIKASI DI LINGI JNGAN PEMERINTAH K BUPATEN MINAHASA SE ATAN

FORM ILIR VI

**LEMBAR PE YERAHAN PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENER MAAN GRATIFIKASI**
**TIM PENGE DALI GRATIFIKASI**
**PEMERINTAH KABU ATEN MINAHASA SELATA**

| No. | Pelapor | | Pen eri | | emberian | | Tar igal Pene maan | Tanggal Pelaporan | J nis/Bentuk P enerimaan | Nilai Eq Rp. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nama | abatan | Nama | Jabatan/ Hubungan | Bentuk | Nilai Eq Rp. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**KOMITE PENGENDALI GRATIF KASI**

(Nama Jelas)
Ketua

**TIM PENGENDALI GRATIFIKASI**

(Nama Jel as)
Ketua

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**